

**PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG PELAYANAN  
TERPADU DENGAN *ONE STOP SERVICE* DI DESA  
PENGAMBENGAN, JEMBRANA, *BALI***



**ARTIKEL ILMIAH**

oleh :

**Aurelia Regina Caeli**

**NIM 1612028023**

**PROGRAM STUDI S-1 DESAIN INTERIOR  
JURUSAN DESAIN FAKULTAS SENI RUPA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**2020**

## Perancangan Interior Gedung Pelayanan Terpadu dengan *One Stop Service* di Desa Pangembengan, Jembrana, Bali

---

Aurelia Regina Caeli

1612028023

Program Studi Desain Interior FSR ISI YK

### Abstract

Gedung Pelayanan Terpadu is a government institute that serves the management and utilization of fish resources, as well as the operational safety of fishing boats. The advancement of the maritime and fisheries sector in this area must be supported by adequate services, especially since the sea is the main source of livelihood for the Balinese. This Gedung Pelayanan Terpadu design aims to improve service quality and facilitate ship licensing through the *One Stop Service* system which will be implemented. In this design, the methods used are analysis and synthesis, namely collecting data and problems and processing them into alternative designs to produce design solutions. To create an atmosphere that is comfortable, professional and has social values, the concept that will be abbreviated is "*Clean Line-Deco*". This concept is a combination of *Clean Line* representations and *Art Deco* depictions, both of which refer to simple, bold, strong and graceful colors, to improve the function of the room and facilities that are served. The use of local materials such as stone, wood, and glass from the craftsmanship of the Balinese people itself will foster the social value of this building. The application of this concept is expected to indirectly fulfill the needs of the people of Jembrana Port and preserve local craftsmen in Bali.

**Keywords:** service, fishery, society

### Intisari

Gedung Pelayanan Terpadu merupakan sebuah instansi pemerintahan yang melayani pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Majunya sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini harus didukung dengan pelayanan yang memadai, terlebih lagi laut merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Bali. Perancangan Gedung Pelayanan Terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah perijinan kapal melalui sistem Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service*) yang akan di terapkan. Dalam perancangan ini metode yang akan digunakan adalah analisa dan sintesa, yaitu pengumpulan data – data dan permasalahan lalu mengolahnya menjadi alternatif desain sampai menghasilkan solusi desain. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, profesional dan memiliki nilai sosial, maka konsep yang akan dingkat adalah "*Clean Line-Deco*". Konsep ini merupakan gabungan dari representasi *Clean Line* dan penggambaran *Art Deco*, dimana keduanya mengacu pada bentuk yang sederhana, tegas, warna yang kuat dan anggun, sehingga dapat meningkatkan fungsi dari ruangan maupun fasilitas yang disuguhkan. Penggunaan material lokal seperti batu, kayu, dan kaca dari keahlian (*craftsmanship*) masyarakat Bali sendiri akan menumbuhkan nilai sosial dari bangunan

ini. Penerapan konsep ini diharapkan secara tidak langsung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Pelabuhan Jembrana serta melestarikan pengrajin lokal di Bali.

**Kata Kunci :** pelayanan, perikanan, masyarakat

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan literatur yang saya dapatkan ketika melakukan perancangan interior Gedung Pelayanan Terpadu saat ini pemerintah sedang mencanangkan peraturan - peraturan maupun kegiatan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah. Terlebih untuk kegiatan yang menjadi mata pencaharian penduduk di negara maritim ini. Dalam upaya mewujudkan kelancaran regulasi, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan membawahi dan bertanggungjawab atas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), salah satunya yang terletak di Desa Pangembengan Jembrana, Bali, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014, Pelabuhan Perikanan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai *support system*, Pelabuhan Perikanan Nusantara menampung kegiatan masyarakat perikanan, terutama terhadap aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan masyarakat nelayan. Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi : penyediaan basis (*home base*) bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal - kapal ikan seperti air tawar, menyediakan bahan bakar minyak, menyediakan es untuk perbekalan dan lain-lain. Sedangkan dalam pelayanannya terhadap nelayan sebagai unsur tenaga produksi meliputi : aspek pengolahan, aspek pemasaran dan aspek pembinaan masyarakat nelayan.

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana upaya pemerintah Bali dalam meningkatkan kemudahan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat perikanan melalui sistem Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service*). Yang mana diharapkan dengan sistem ini permasalahan seperti macetnya perizinan dan lama durasi pengeluaran surat – surat yang diperlukan nelayan maupun pedagang ikan dapat terpecahkan.

## 2. METODE PERANCANGAN

Dalam perancangan interior Gedung Pelayanan di Kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan Bali metode desain yang akan digunakan merupakan metode yang berdasar pada teori Rosemary Kilmer dan W. Ottie Kilmer. Menurut teori yang dikemukakan oleh Kilmer pada bukunya yang berjudul *Designing Interiors* (Kilmer, 1992) proses desain dibagi menjadi dua tahap, yakni analisis dan sintesis, yang memiliki tahapan – tahapan meliputi :

- a. **Commit** merupakan tahap dimana desainer mengidentifikasi masalah pada proyek dan berkomitmen terhadap masalah tersebut.
- b. **State** merupakan tahap dimana desainer harus menetapkan permasalahan yang harus diselesaikan dan membuat daftar permasalahan.
- c. **Collect** merupakan tahap pengumpulan fakta dan informasi mengenai proyek yang akan dilaksanakan.
- d. **Analyze** merupakan tahap dimana desainer melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh.
- e. **Ideate** merupakan tahap mengeluarkan ide dalam bentuk konsep dan skematik.
- f. **Choose** merupakan tahap pemilihan ide alternatif yang paling sesuai dan memenuhi kebutuhan proyek dari keseluruhan ide yang telah dibuat.
- g. **Implement** merupakan tahap melaksanakan penggambaran dalam bentuk pencitraan 3D dan 2D, gambar *renderings*, serta presentasi yang mendukung.
- h. **Evaluate** merupakan tahap peninjauan yang dilakukan oleh desainer pada desain yang sudah dibuat.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL

### a. Masyarakat Pesisir

Wilayah Bali dikelilingi oleh laut, banyaknya pesisir pantai menjadikan nelayan sebagai salah satu mata pencarian utama masyarakat Bali. Dalam hal ini kegiatan mencari ikan tidak dilakukan dengan sembarangan, untuk berlayar setiap kapal diwajibkan memiliki ijin tangkap, sehingga hasil tangkapnya dapat diperjual belikan. Layaknya kendaraan bermotor memiliki STNK, kapal – kapal yang digunakan untuk menangkap ikan juga wajib memiliki Buku Kapal. Selain nelayan kegiatan budidaya ikan, pembuatan / pengedaran pakan ikan, *export import* juga banyak kegiatan masyarakat pesisir lainnya wajib didaftarkan dan memiliki ijin usaha. Sehingga dibutuhkan fasilitas yang diwadahi oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan – kegiatan masyarakat pesisir ini. Dari sini kemudian pemerintah menyediakan Gedung Pelayanan Terpadu yang kemudian menjadi tempat pengaduan dan permintaan perizinan. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan

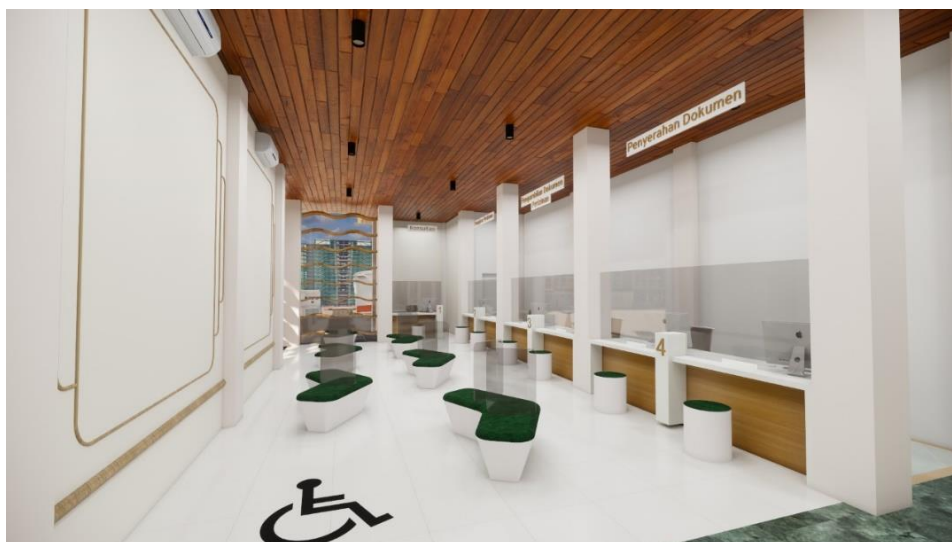
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan (Sinambela, 2011:5). Sedangkan di dalam Undang - undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

### **b. Pelayanan Satu Pintu**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat,.

### **c. Penyederhanaan Layout**

Untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan pasti sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diterapkan didaolam Gedung Pelayanan Terpadu, layout ruangan yang tepat akan sangat dibutuhkan. Terdapat 4 loket yang akan diperlukan dalam tahap perizinan kapal, yang pertama yaitu loket konsultasi, yang kedua loket penjuan perizinan, yang ketiga loket pengambilan dokumen perizinan, dan yang terakhir loket penyerahan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dan LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan). Perencanaan layout dalam satu ruang yang mampu manampung loket – loket tersebut menjadi salah satu kunci utama kelancaran kegiatan perizinan.



Gb. 1 Perspektif Render Ruang Pelayanan Terpadu (Sumber : Penulis, 2020)

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kebutuhan masyarakat dan upaya pemerintah dalam menunjang pelayanannya, sistem Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) dirasa cukup berdampak besar. Penggabungan loket – loket memudahkan para nelayan maupun pelaku usaha dalam melakukan permohonan perizinan. Selain masyarakat, pegawai pelayanan juga akan mudah untuk saling berkoordinasi antar bidang karena berada pada tempat yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan

Kilmer, Rosemary. (1992). *Designing Interiors*. California: Wadsworth Publishing Company.

Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

